

3 Desa di Cimenyan Terdampak Puting Beliung

BANDUNG (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menyebutkan ada tiga desa di Cimenyan yang terdampak akibat hantaman angin puting beliung. Di tiga desa tersebut angin puting beliung menghantam ratusan rumah, pohon dan tiang listrik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung Akhmad Djohara. Warga di tiga desa tersebut pun tengah sibuk membersihkan puing-puing bekas rumah mereka yang terhantam angin puting beliung tersebut.

“Dari kejadian hari Minggu kemarin, dari laporan di lapangan yang terdampak itu tiga desa, Desa Mekarsaluyu, Desa Ciburial dan Desa Cimenyan,” ungkap Akhmad kepada wartawan di lokasi kejadian, Senin (29/3).

Akhmad mengatakan, saat ini pihaknya beserta sejumlah relawan membantu warga membersihkan sisa

puing-puing rumah. Selain itu, pihaknya tengah mencoba membuka akses jalan yang masuk tertutup akibat tumbang pohon.

“Yang sudah dilakukan kita memberikan bantuan darurat, sore dan malam hari ketika kejadian. Tim cepat kami membantu memotong kayu yang roboh, sehingga akses mobil PLN yang akan memperbaiki listrik,” kata Akhmad.

Hingga saat ini, masyarakat masih belum bisa mengakses listrik. Gardu listrik yang berada di tepi jalan rusak akibat terhantam oleh angin puting beliung.

Akhmad mengimbau agar masyarakat lebih waspada di tengah musim yang tidak menentu saat ini.

Sebelumnya, puting beliung yang berwarna hitam pekat menghantam rumah warga, Minggu (28/3) sore. Warga yang melihat angin tersebut mengamankan diri dengan bertakut di rumah, dan sebagian lagi bersembunyi di tempat yang aman. ● yan

IDN/ANTARA



JASA SERVIS JIMBE

Pekerja menyelesaikan servis kendang jimbe di Djemberosestation, Depok, Jawa Barat, Senin (29/3). Meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, jasa servis alat musik kendang jimbe tersebut kini mulai bangkit dengan mendapatkan orderan dari beberapa daerah di Indonesia dengan biaya servis Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu tergantung tingkat kerusakan.

Hengky Kurniawan Imbau Warga Manfaatkan Sampah Plastik

BANDUNG BARAT (IM) - Sosialisasi peduli sampah dan edukasi pilah sampah digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bandung Barat, Senin, (29/3) kemarin.

Acara itu diisi oleh kegiatan membersihkan area sekitar Sungai Citarum, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengedukasi warga untuk memilah sampah mulai dari rumah. “Saya berharap warga Bandung Barat bergerak untuk berpartisipasi dan ikut andil bersama pemerintah untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta bersama-sama merawat lingkungan di sekitar kita. Dengan mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah,” kata Hengky Kurniawan dalam keterangan resmi, Senin (29/3).

Hengky mengatakan, program ini sekaligus memberikan edukasi bagaimana masyarakat dapat menjaga lingkungan hidupnya, dan memahami proses pemilihan sampah yang baik.

Masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap sampah, terutama sampah plastik. “Padahal kenyataannya, tidak semua sampah plastik itu tidak bernilai. Ada jenis

sampah plastik yang bisa dimanfaatkan dan malah menambah nilai ekonomi untuk masyarakat. Seperti salah satu contohnya adalah sampah plastik berbahan dasar PET,” kata Hengky.

Selain program sosialisasi peduli sampah dan edukasi pilah sampah akan ada edukasi kepada seluruh masyarakat untuk lebih peduli dengan keindahan dan kesehatan lingkungan agar terbebas dari sampah dengan cara bercocok tanam.

Bercocok tanam, kata dia, adalah salah satu aktivitas yang perlu untuk ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Tidak hanya berfungsi untuk penghijauan ataupun keindahan lingkungan sekitar rumah, tanaman pun dapat menjadi salah satu sumber pangan keluarga.

Selain program edukasi pemilahan sampah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan sirkular ekonomi, program kolaborasi dengan Kabupaten Bandung Barat ini juga menggelar lomba menanam tanaman secara hidroponik dengan media tanam menggunakan botol atau galon bekas berbahan PET.

Program ini secara khusus menasar kelompok PKK dan masyarakat di desa-desa yang berlokasi di Bandung Barat untuk turut berpartisipasi. ● pur

4.184 RTLH di Kabupaten Bogor Dibenahi Tahun Ini

CIBINONG (IM) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, berencana merehabilitasi 4.184 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2021 ini.

Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor Lestiana Irmawati mengatakan, penanaman 4.184 unit RTLH tersebut, bakal dilakukan menggunakan anggaran dari berbagai sumber. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Dari 4.184 unit tersebut, 2.000 diantaranya bakal dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bogor,

sementara 2.000 RTLH lainnya bakal menggunakan bantuan Pemprov Jawa Barat 780 unit dan BSPS Kemen PUPR 1404 unit RTLH.

Untuk RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, sambungnya, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar, dengan alokasi Rp15 juta per unit. “Kalau dari APBD Kabupaten Bogor besaran-nya Rp15 juta per rumah. Sementara dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp17,5 juta per rumah dan dari program BSPS juga Rp17,5 juta,” katanya Senin (29/3).

Kendati demikian, untuk bantuan dari Pemprov Jawa Barat dan BSPS, bakal diberikan dalam bentuk non-tunai. “Jadi nanti pemberiannya itu berupa barang dan bahan bangunan, yang akan diberikan langsung kepada penerimanya,” tutupnya. ● yy

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KEBAKARAN TANGKI PERTAMINA BALONGAN BELUM PADAM

Kepulan asap hitam akibat kebakaran tangki minyak milik Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/3). Akibat kebakaran tersebut sedikitnya 20 orang terluka dan 500 warga yang tinggal di dekat lokasi terpaksa mengungsi.

Ridwan Kamil Serahkan LKPD Tahun 2020 kepada BPK Jabar

“Ini merupakan wujud keseriusan kami (Pemda provinsi Jabar), di mana saya sendiri langsung melaporkan keuangan Pemerintahan Provinsi Jabar. Kami merasa sudah sangat baik bekerja dengan standar-standar prudensial yang baik, dan berharap ada kewajaran tanpa pengecualian sehingga bisa WTP yang kesepuluh kalinya,” ujar Ridwan Kamil.

KOTA BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Senin (29/3).

“Kami menyerahkan laporan keuangan Pemda Provinsi Jabar yang belum diaudit. Sesuai jadwal, akhir bulan ini sampai Mei akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK, yang hasilnya disampaikan saat (sidang) paripurna,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil menjelaskan, terdapat enam kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari dokumen perencanaan keuangan yang harus sinkron, kualitas anggaran belanja dalam APBD, penyerapan anggaran dengan transparan, sampai Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Ini merupakan wujud keseriusan kami (Pemda provinsi Jabar), di mana saya sendiri langsung melaporkan keuangan Pemerintahan Provinsi

Jabar. Kami merasa sudah sangat baik bekerja dengan standar-standar prudensial yang baik, dan berharap ada kewajaran tanpa pengecualian sehingga bisa WTP yang kesepuluh kalinya,” ujarnya.

Menurut Kang Emil, pihaknya mendapatkan bimbingan dari BPK Perwakilan Jabar untuk terus memperbaiki proses regulasi keuangan. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi.

“Tentulah dengan bimbingan BPK Perwakilan Jabar. Perbaikan-perbaikan, digital-

isasi dan teknik-teknik mengurugi kekeliruan sudah dilakukan,” katanya.

Ia berharap perbaikan-perbaikan tidak hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota di Jabar. “Saya punya kewajiban membimbing juga 27 daerah, karena keberhasilan itu harus melingkupi seluruh daerah di Jabar. Tahun lalu juga semuanya mendapat WTP, sehingga konsistensi itu sekarang menjadi sebuah tantangan,” tuturnya. ● yy

Ridwan Kamil: Cari Tahu Penyebab Kebakaran Kilang Balongan

CIANJUR (IM) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil masih mencari kabar pasti soal penyebab kebakaran tangki di kilang Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu. Sehingga ke depannya bisa diantisipasi agar insiden serupa tidak terulang lagi.

“Kita ingin tahu apa penyebabnya, supaya tidak terulang lagi dan secepatnya terungkap. Kita fokus kepada preventif supaya tidak terulang lagi,” ujar Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII DPW PPP Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Senin (29/3).

Kang Emil mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Pertamina saat ini kondisi sudah mulai terkendali. Namun, lanjut dia, semua pihak saat ini masih berfokus pada penyelamatan korban kebakaran di Kilang Minyak PT Pertamina RU VI Balongan.

“Kita fokus pada penyelamatan nyawa dulu ada empat yang luka berat dan belasan luka ringan sudah di rujuk ke rumah

sakit daerah,” ujar Emil.

Pemerintah Daerah Provinsi Jabar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kang Emil pun sudah menginstruksikan BPBD Provinsi Jabar untuk memastikan semua kebutuhan warga yang mengungsi terpenuhi dan tetap aman dari penularan COVID-19.

“Warga yang berada di radius kilang potensi bahaya sudah diungsikan. Sekitar 500 orang sudah diungsikan Pertamina ke GOR dan Kantor Pendopo Indramayu,” ucapnya.

Ia juga menuturkan, saat ini Pertamina telah mematikan sementara sistem operasi dan mencegah kebakaran agar tidak meluas. “Pertamina pun menyampaikan permohonan maaf dan yang kedua juga memastikan pasokan BBM tidak terganggu,” katanya.

Pertamina pun meminta warga sekitar untuk tetap tenang, dan menjauh dari lokasi kebakaran. Saat ini, dilakukan pemblokiran yang luka berat dan belasan luka ringan sudah di rujuk ke rumah

DPRD Jabar Desak Izin Tambang Pasir di Kaki Gunung Galunggung Dicabut

BANDUNG (IM) - Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Ali Rasyid mendesak agar pemerintah mencabut izin penambangan pasir di kawasan Gunung Galunggung, tepatnya di Leuweung Keusik, Desa Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Padahal warga telah melakukan berbagai aksi penolakan terkait aktivitas penambangan tersebut.

Ali menjelaskan ada tiga alasan masyarakat menolak kegiatan penambangan di Leuweung Keusik. Pertama adalah rusaknya ekosistem di kawasan tersebut, kemudian rusaknya daerah resapan air yang akan mengundang banjir dan longsor.

“Bahkan daerah Leuweung Keusik juga berfungsi sebagai tanggul alam penahan lahar letusan Galunggung, jika kawasan ini rusak maka bencana alam akibat letusan Galunggung bisa sangat besar, lahar panas akan dengan mudah masuk ke kawasan permukiman warga,” kata Ali di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (29/3).

Alasan yang kedua, adalah hilangnya kearifan lokal yang merupakan cagar alam dan budaya di wilayah kaki Gu-

nung Galunggung. “Ketiga, berpotensi membuka akses untuk eksploitasi secara besar-besaran di lereng dan wilayah kaki Gunung Galunggung sehingga berpotensi juga menimbulkan bencana besar lainnya,” tutur Ali.

Di daerah Leuweung Keusik sendiri, ada belasan mata air yang menjadi sumber air untuk warga. Menurut Ali, masyarakat khawatir sumber air tersebut akan hilang karena sumber atau daerah resapannya rusak.

“Dampak kerusakan pasca digali akan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan kawasan dan siapa yang akan bertanggung jawab? Belum infrastruktur jalan yang juga dipastikan akan rusak, karena mondar-mandirnya truk pengangkut pasir,” katanya.

Ali mengatakan seharusnya Pemprov Jabar yang tengah gencar menggenjot industri pariwisata lokal bisa membantu mengembangkan daerah tersebut. Apalagi empat kilometer dari Leuweung Keusik terdapat tempat wisata kolam air hangat Citiis yang potensial untuk dikembangkan oleh Bumdes setempat.

“Sumber air yang mengalir

dari Gunung Galunggung mestinya dimanfaatkan pula untuk pengembangan pangan, baik di bidang pertanian atau perikanan, pemerintah bisa saja mengembangkan kawasan Galunggung sebagai kawasan Minapolitan atau kawasan perikanan atau pertanian terpadu,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum pernah mendatangi lokasi penambangan bersama dengan Kadis ESDM. Kegiatan penambangan itu dihentikan sementara, walau sempat beroperasi pada Februari lalu.

Ali memahami saat ini ada undang-undang baru yakni UU No 3 Tahun 2020 bahwa kewenangan izin penambangan sekarang diambil alih oleh pusat. “Permintaan kami di sini memohon kepada Pemprov Jabar yaitu Gubernur dan Dinas ESDM untuk bertanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM supaya membatalkan, mencabut izin yang sudah dikeluarkan dan meminta kepada Kementerian ESDM untuk meninjau ulang semua izin pertambangan yang ada di kawasan Gunung Galunggung,” ujar Ali. ● yan



IDN/ANTARA

TERMINAL CIBINONG TIDAK TERAWAT

Sejumlah kendaraan angkutan umum berada di samping kubangan air akibat jalan rusak di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/3). Tidak terawatnya infrastruktur serta rusaknya jalan terminal yang menyebabkan kubangan air tersebut, membuat tidak nyaman penumpang serta awak angkutan umum yang menggunakan fasilitas terminal.